

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 4 TAHUN 2010 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM PERSPEKTIF OTONOMI
DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

ARIF FAHMI

09340113

PEMBIMBING:

- 1. ISWANTORO, S.H., M.H.**
- 2. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang diandalkan bagi penerimaan pendapatan daerah di Kota Yogyakarta. Dari sisi pendapatan daerah, terbukti bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kepariwisataan yang tertinggi berasal dari pajak hotel dan pajak restoran. Semakin banyak wisatawan yang menggunakan jasa hotel dan restoran, semakin berdampak juga terhadap penerimaan pajak yang dihasilkan. Selain itu, kedua sektor ini juga mampu menciptakan tenaga kerja yang cukup banyak sebagai tumpuan ekonomi di daerah. Perlu adanya kajian yang mendalam terhadap kepariwisataan daerah terhadap konsep pemerintahan daerah atau otonomi daerah berdasarkan kajian Hukum Tata Negara. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: Bagaimanakah pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2010 terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta, dan Hambatan apa saja yang ditemui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2010 terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris yaitu penelitian yang tidak hanya mempelajari Pasal perundang-undangan, tetapi juga menggunakan bahan yang sifatnya normatif itu dalam rangka mengolah dan menganalisis data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan. Studi lapangan meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu penganalisaan data untuk menggambarkan suatu masalah berikut pemecahannya dengan menggunakan uraian kalimat yang diperoleh dari data kualitatif yang telah disimpulkan.

Hasil penelitian terhadap Implementasi Perda No. 4 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan kepariwisataan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyebabkan peran kepariwisataan terhadap penerimaan pendapatan cukup memberikan pemasukan kepada daerah dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini didukung dengan keberagaman Obyek Pariwisata yang meliputi: wisata budaya, wisata bangunan bersejarah, wisata pendidikan, wisata konvensi, wisata kuliner, wisata minat khusus dan wisata belanja. Adapun yang menjadi hambatan dari penyelenggaraan kepariwisataan meliputi: Daya Dukung Infrastruktur, Keamanan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Keramahan. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta dalam konsep kepariwisataan didasarkan kepada sistem pemerintahan yang baik (*good government*).

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Fahmi
NIM : 09340113
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Prespektif Otonomi Daerah Di Kota Yogyakarta adalah benar-benar karya saya sendiri sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan yang lazim.

Yogyakarta, 17 Desember 2013

Penulis


Arif Fahmi
NIM. 09340113

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Arif Fahmi

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arif Fahmi

NIM : 09340113

Judul : **“Implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Perspektif Otonomi Daerah Di Kota Yogyakarta”**

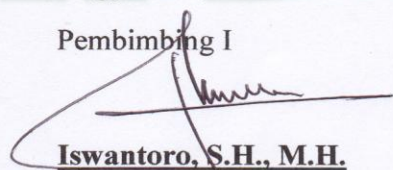
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 17 Desember 2013

Pembimbing I


Iswantoro, S.H., M.H.

NIP.196610101992021001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Arif Fahmi

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arif Fahmi

NIM : 09340113

Judul : **“Implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Perspektif Otonomi Daerah Di Kota Yogyakarta”**

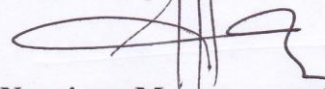
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 17 Desember 2013

Pembimbing II



Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 197510102005012005

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir

Skripsi/Tugas akhir dengan judul: “Implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Perspektif Otonomi Daerah Di Kota Yogyakarta”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Arif Fahmi

Nim : 09340113

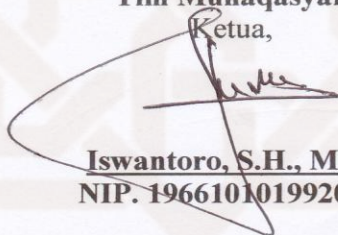
Telah dimunaqasyahkan pada : 30 Desember 2013

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

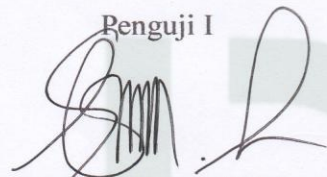
Ketua,



Iswantoro, S.H., M.H.

NIP. 196610101992021001

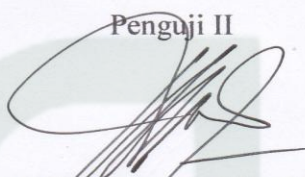
Penguji I



Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji II



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 30 Desember 2013

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari’ah dan Hukum

Dekan,



Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO:

Eat, Pray, Love.

Manusia Tidak Hebat Dalam Segala Hal.

Halaman Persembahan

Dialah ladang hati, yang kau taburi dengan kasih dan kau subur dengan penuh rasa terima kasih. Dan dia pulalah naungan dan pendianganmu. Kerana kau menghampirinya saat hati lupa dan mencarinya saat jiwa memerlukan kedamaian.”kahlil-gibran”

Kupersembahkan buah karya kecil ini untuk Ibunda Roaenah, terimakasih atas doa dalam setiap sujudmu, dan kasih sayangmu sepanjang waktu, cinta dan dukungan berupa moril maupun materil dari orang tua penulis terkasih. Terima kasih atas segala yang telah dilakukan demi penulis, dan terimakasih atas setiap cinta yang terpancar serta doa dan restu yang selalu mengiringi tiap langkah penulis.

Kepada Bibi Samiah, S.Pdi. yang senantiasa ada untuk memberikan dukungan, melantunkan doa serta mengusahakan segala macam bantuan terkait penyelesaian Study ini. Terima kasih atas semua yang telah dilakukan, terima kasih telah senantiasa menguatkan di kala penulis terpuruk dan sempat merasa tidak mampu melakukan apa-apa. yang selalu hadir dalam setiap permasalahan, doa dan dukungannya terimakasih.

Teruntuk Adik-adik dan kakak tersayang, penulis haturkan banyak doa dan terima kasih atas segala doa, dukungan, canda, tawa dan macam-macam bantuan dalam menyelesaikan Skripsi ini. Untuk Hadi Yatna, Zaenal Subadri dan Januar Ruswandi, semoga semua usaha penulis dapat menjadi lecutan semangat tak terhingga agar adik-adik dan kakak dapat menggapai hal yang sama bahkan lebih demi kebahagiaan dan kebanggaan orang tua tercinta.

Terima kasih untuk keluarga besar yang senantiasa memotivasi serta selalu mendoakan kelancaran studi hingga Skripsi ini terselesaikan. Terima kasih untuk semua keluarga yang tak bisa disebutkan satu per satu dari Mamang, Bibi, dan semua sepupu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انّ محمّدا رسول الله
والصّلاة و السّلام على اشرف المرسلين محمّد و على اله و اصحابه
أجمعين، أمّا بعد.

Syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang memiliki keistimewaan dan pemberian segala kenikmatan besar, baik nikmat iman, kesehatan dan kekuatan didalam penyusunan skripsi ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad SAW. keluarga dan para sahabatnya dan penegak sunnah-Nya sampai kelak akhir zaman, akhirnya penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Prespektif Otonomi Daerah Di Kota Yogyakarta” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan beberapa pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musya Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, SHI., LL.M., M.A. selaku Sekjur Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing I atas bimbingan, kesabaran, dan pengarahan yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Nurainiun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan senang hati telah meluangkan waktu untuk membimbing dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Staf Pengajar (Dosen) Ilmu Hukum yang telah memberikan bekal pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
8. Seluruh Staf Karyawan/Karyawati Fakultas Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Bapak Badrudin selaku Staf prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan pelayanan terbaik selama penulis mengikuti proses pendidikan.
9. Kepada Bapak Sigit dan Staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta yang telah memberikan data-data dan bantuan kepada penulis.
10. Teman-teman Ilmu Hukum Akhmad Sobirin (Makrin), Subur (Makbur), Iqbal (Makbal), Torik (Toying), Irul (Kecrek), Yasin, Kholid (Kuman), Ismuhar, Andi Muhammad Fuad, mahmudi (bep), dan teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2009

yang selalu memberi semangat, dukungan, dan turut membantu selesinya laporan

Skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

11. E S U (Embing) yang selalu memberikan motivasi tiada henti, cepet nyusul.

12. Teman-teman Komnas Teguh (Blues), Rizal (Ahong), Eko Santoso (Kodok), Cak

Dawang, Adit, Abi dan Tomcat. Selamanya kita tetap keluarga.

Penulis yakin penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik selalu penulis harapkan untuk memperbaiki penulisan Skripsi ini.

Akhir kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan Skripsi ini saya melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak.

Yogyakarta, 17 Desember 2013
Penyusun

Arif Fahmi
NIM. 09340113

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teoretik	11
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN TEORETIK KEPARIWISATAAN DAN	
KEUANGAN NEGARA.....	21
A. Kepariwisata Dalam Otonomi Daerah.....	21
1. Pengertian Pariwisata, Hotel dan Restoran	17

2. Perizinan dan Jenis-jenis Usaha Pariwisata	20
3. Kepariwisataaan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	23
B. Keuangan Negara	33
1. Pengertian Anggaran.....	33
2. Sumber-sumber Penerimaan Negara	35
3. Keuangan Daerah.....	38
4. Sumber-sumber Pendapatan Daerah.....	39
5. Tata Kelola Keuangan yang Baik.....	42
C. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	46
1. Pajak Daerah.....	47
2. Retribusi Daerah.....	49
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	50
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	51
BAB III GAMBARAN UMUM DINAS PARIWISATA DAN	
KEBUDAYAAN KOTA YOGYAKARTA	54
A. Letak Geografis	54
B. Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.....	55
C. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Yogyakarta.....	57
D. Tematik Pariwisata Berbasis Budaya.....	58

E. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.....	60
BAB IV IMPLEMENTASI PERDA NO. 4 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAN KEPARIWISATAAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA	61
A. Tinjauan Perda No. 4 Tahun 2010 dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta	61
B. Hambatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	79
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan pendekatan kesisteman meliputi Sistem Pemerintahan Pusat dan Sistem Pemerintah Daerah. Praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungan antar pemerintah, dikenal dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi. Konsep sentralisasi menunjukkan karakteristik bahwa semua kewenangan penyelenggaraan pemerintah berada di pemerintah pusat, sedangkan sistem desentralisasi menunjukkan karakteristik sebagian kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah, diberikan kepada Pemerintah Daerah.¹

Otonomi daerah merupakan asensi pemerintahan desentralisasi. Di dalam otonomi hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintah atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah.² Otonomi Daerah merupakan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga yang melekat baik pada negara kesatuan. Di dalam negara kesatuan, otonomi daerah lebih terbatas dibanding dengan negara yang berbentuk federasi. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri di daerah kesatuan meliputi

¹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 11.

² Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 83.

segenap kewenangan Pemerintah Daerah kecuali beberapa unsur yang dipegang oleh Pemerintah Pusat³

Masalah yang sangat penting di daerah otonom adalah masalah keuangan yang menjadi sumber hidup bagi daerah, bahkan yang menjadi salah satu dasar utama dalam mempertimbangkan dibentuknya suatu wilayah Negara menjadi daerah otonom, karena otonomi tanpa ditunjang kemampuan keuangan daerah berakibat kepada lemahnya *instrument* di daerah untuk mengembangkan pembangunan daerah. Makin besar jumlah uang yang tersedia, makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Demikian juga semakin baik pengelolaannya semakin bardayaguna pemakaian uang tersebut.⁴

Sebagai wujud dalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangannya sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antara Provinsi dan Kabuten/Kota yang merupakan prasyarat dalam sistem Pemerintah Daerah.⁵ Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 157 telah diatur sumber pendapatan Daerah yang terdiri atas : (a) PAD meliputi hasil pajak daerah,

³ J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 3.

⁴ Josef Riwo Kaho, *Prospektif Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm . 67.

⁵ Abdul Halim dan Ibnu Mujib, *Problematika dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah*, (Yogyakarta: Sekolah Pasca Sasjana UGM, 2009), hlm. 76.

hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, (b) dana perimbangan, (c) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan ketentuan di atas, maka Pemerintah Daerah dapat mengelola dan mengatur dan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah yang ada di Daerahnya.

Perkembangan pariwisata sekarang ini sangat pesat dan memberikan peluang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional. Untuk itu pembangunan pariwisata terus mendapat perhatian dan pemerintah mempunyai keyakinan bahwa pariwisata dapat menjadi sektor andalan menggantikan minyak dan gas bumi yang selama ini menjadi andalan pemerintah dalam menunjang penerimaan negara.

Dunia pariwisata telah mengalami berbagai perubahan baik perubahan pola, bentuk dan sifat kegiatan, serta dorongan orang untuk melakukan perjalanan, cara berpikir, maupun sifat perkembangan itu sendiri.⁶ Pariwisata merupakan industri gaya baru yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor lain di dalam negara penerima wisatawan. Di samping itu pariwisata sebagai suatu sektor yang kompleks meliputi industri-industri seperti industri kerajinan tangan, industri cinderamata, penginapan dan transportasi.⁷ Sebagai industri jasa yang digolongkan sebagai industri

⁶ Gamal Suwanto, *Dasar-dasar Pariwisata*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), hlm. 1.

⁷ Salah Wahab, *Manajemen Kepariwisata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1996), hlm.

ketiga, pariwisata cukup berperan penting dalam menetapkan kebijaksanaan mengenai kesempatan kerja, dengan alasan semakin mendesaknya tuntutan akan kesempatan kerja yang tetap sehubungan dengan selalu meningkatnya wisata di masa yang akan datang.⁸

Yogyakarta adalah salah satu daerah otonom di Indonesia, Daerah multikultural yang didalamnya terdapat berbagai suku, etnis, budaya dan agama, disamping itu semua Yogyakarta adalah Kota budaya dan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia, Hasil survey yang dilakukan website traveling, Skyscanner.⁹ Yogyakarta menempati urutan ke 4 setelah Jakarta, Bali dan Surabaya dalam 10 Besar kota tujuan wisata domestik Indonesia, atas dasar itu semua Pemerintah Kota Yogyakarta dapat menggali beberapa sumber keuangan di daerahnya, sektor pariwisata menjadi salah satu andalan pemerintah daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta.

Semakin dikenalnya Kota Yogyakarta sebagai kota tujuan wisata, mengakibatkan peran sektor hotel dan restoran sebagai salah satu usaha pariwisata menjadi semakin penting. Hal ini dapat terlihat dalam meningkatnya kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Dari sisi pendapatan daerah, terbukti bahwa realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tertinggi berasal dari pajak hotel dan pajak restoran.

⁸ James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 47.

⁹ <http://www.satubumi.org/kota-tujuan/10-besar-kota-tujuan-wisata-domestik-indonesia-65>, diakses Pukul 23:00 Wib. 20 Oktober 2013.

Semakin banyak wisatawan yang menggunakan jasa hotel dan restoran, semakin besar pula penerimaan pajak yang dihasilkan. Selain itu, kedua sektor ini juga mampu menciptakan tenaga kerja yang cukup banyak sebagai tumpuan ekonomi di daerah.

Seiring dengan perkembangan pariwisata Kota Yogyakarta, sektor hotel dan restoran sebagai pendukung kegiatan pariwisata telah mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian peranan pariwisata. Kondisi ini memberikan peluang bagi sektor hotel dan restoran untuk terus berkembang di Kota Yogyakarta serta terus berperan positif terhadap perekonomian Kota Yogyakarta, pariwisata juga menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat antara lain sosial ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Selain itu industri pariwisata tidak hanya terkait pada atraksi wisata, tetapi juga terkait dengan industri lain, seperti perhotelan, restoran, angkutan (darat, laut, dan udara) dan produk-produk industri lainnya.¹⁰

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang diandalkan bagi penerimaan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta dituntut untuk dapat menggali dan mengelola potensi pariwisata yang dimiliki sebagai alasan dasar untuk mendapatkan pendapatan daerah dalam upaya untuk membiayai pengeluaran daerah dari sektor lain. Dengan peningkatan mutu pelayanan serta kualitas kepariwisataan, hal ini secara tidak langsung akan memberikan

¹⁰ Endang Tjitroesmi, *Peran Industri Kepariwisata dalam Perekonomian Nasional dan Daerah*, (Jakarta: P2E-LIPI, 2003), hlm. 105.

peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, sehingga akan meningkatkan penerimaan daerah.

Dari beberapa sumber diatas peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor Pariwisata khususnya bidang hotel dan restoran perlu mendapat perhatian lebih Pemerintah Daerah, sebagai alasan dasar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dirumuskanlah beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2010 terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta?
2. Hambatan apa saja yang ditemui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2010 terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui bagaimana implementasi Perda No. 4 Tahun 2010 terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta.
- b) Untuk mengetahui hambatan apa saja yang ditemui Dinas Pariwisata Yogyakarta dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

a) Secara Praktis

Karya tulis ini semoga bermanfaat bagi penyusun dalam menulis suatu karya ilmiah, menambah wawasan bagi siapa saja yang membacanya. Dan menjadi masukan yang membangun bagi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.

b) Secara Teoritis

Harapannya karya tulis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Daerah khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, selain itu juga memberikan suatu wacana yang diharapkan dapat digunakan oleh almamater sebagai pemikiran dalam mengembangkan Ilmu Hukum khususnya Hukum Tata Negara.

E. Telaah Pustaka

Dalam sebuah penelitian kualitatif, telaah pustaka merupakan sesuatu yang penting. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, tujuan pokok melakukan telaah pustaka dalam penelitian kualitatif bukan untuk mengemukakan teori yang relevan yang kemudian didedukasikan pada gejala yang hendak diteliti untuk kemudian peneliti membangun hipotesis dan mengupayakan operasional konsep serta kemudian pengukuran-pengukuran, melainkan untuk melakukan jelajah literatur guna menemukan beberapa hal, misalnya gambaran bagaimana penelitian dengan topik yang sama atau mirip telah dilakukan oleh peneliti lain, penggunaan konsep-konsep tertentu oleh peneliti lain mungkin

juga akan digunakan atau setidaknya dianggap relevan dan temuan-temuan empirik oleh peneliti lain yang mungkin dapat dirujuk.¹¹

Selain itu untuk menghindari kesamaan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya telaah pustaka diperlukan dalam penulisan skripsi. Maka penyusun mengadakan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Tidak ada yang secara rinci membahas tentang Implementasi Perda No. 4 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan kepariwisataan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam prespektif Otonomi Daerah di Kota Yogyakarta. Namun ada beberapa skripsi yang membahas obyek penelitian kepariwisataan maupun Otonomi Daerah. Di antaranya adalah :

Skripsi Atika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Implementasi Pengaturan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Sleman" membahas implementasi pengaturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah apakah sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008, selain itu juga dibuktikan dengan peran Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman memang sangat besar kontribusinya terhadap pelaksanaan otonomi daerah, Penarikan Pajak, Retribusi, dan Peran BUMD.¹²

¹¹ Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Lkis, 2007), hlm. 81-83.

¹² Atika "Implementasi Pengaturan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Sleman," *Skripsi Ilmu Hukum*, Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2013.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa skripsi yang ditulis berbeda dengan saudara Atika, karena skripsi ini mengkaji pengaturan yang dikeluarkan Pemda Kabupaten Sleman untuk meningkatkan pendapatan, dan penelitian ini mengkaji PAD secara umum.

Skripsi Murdianto Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang dengan judul “Upaya Pemerintah Kota Singkawang Dalam Mengembangkan Obyek Wisata” Skripsi ini mengkaji perlunya menggali potensi pariwisata yang layak untuk dikembangkan secara serius guna mendatangkan hasil yang positif bagi pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta pengembangan sarana dan prasarana, dan peningkatan koordinasi dengan dinas lain serta pihak swasta.¹³

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa skripsi yang ditulis berbeda dengan saudara Murdianto, karena dalam skripsi ini lebih menekankan terhadap sudut pandang Ilmu Administrasi dan Obyek Penelitiannya yang berbeda karena berada di Kota Singkawang.

Skripsi Hedi Purwoko Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan judul “Peran Dinas Pengelolaan Pasar dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta” skripsi ini mengkaji mengenai peranan

¹³ Murdianto “Upaya Pemerintah Kota Singkawang Dalam Mengembangkan Obyek Wisata” *Skripsi*, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, 2007.

Dinas pengelolaan pasar dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta.¹⁴

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa skripsi yang ditulis berbeda dengan saudara Hedi Purwoko, skripsi ini membahas pengelolaan pasar sebagai strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Skripsi Lenni Rina Kurnia “Implementasi Strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam Mengangkat Retribusi Pariwisata dalam Rangka Menunjang Pendapatan Asli Daerah Tahun 2005-2006” skripsi ini mengkaji mengenai strategi-stategi yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam mengangkat Pendapatan Asli Daerah dari penerimaan retribusi pariwisata.¹⁵

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa skripsi yang ditulis berbeda dengan saudara Lenni Rina Kurnia, skripsi ini selain obyek penelitian dan tahun yang berbeda, upaya untuk menambah pendapatan hanya dari retribusi.

Beberapa judul skripsi yang telah disebutkan diatas, belum ada yang membahas tentang : Implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Prespektif Otonomi Daerah Di Kota Yogyakarta.

¹⁴ Hedi Purwoko “Peran Dinas Pengelolaan Pasar dalam Peningkatan Pendapatan Asli daerahn(PAD) di Kota Yogyakarta” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2009.

¹⁵ Lenni Rina Kurnia “Implementasi Strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Dalam Mengangkat Retribusi Pariwisata Dalam Rangka Menunjang Pendapatan Asli Daerah Tahun 2005-2006” *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007.

F. Kerangka Teoretik

Dalam konstitusi, Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (1) menyebutkan “Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas Daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu di bagi atas Daerah Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai Pemerintah Daerah, yang diatur Undang-Undang.¹⁶ Negara kesatuan dapat di bedakan dalam dua bentuk: (1) Negara kesatuan dengan sistem Sentralisasi. (2) Negara kesatuan dengan sistem Desentralisasi. Dalam Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang di namakan dengan daerah otonom.¹⁷

Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemerintahan di daerah dapat dibagi 2 (dua) jenis yakni Pemerintahan Lokal Administratif atau *Local State Goverment* dan Pemerintah Lokal yangng mengurus Rumah tangganya sendiri atau *Local Self Goverment*. Negara di samping sebagai organisasi kemasyarakatan juga sebagai organisasi kekuasaan kemasyarakatan

¹⁶ Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

¹⁷ Ni'matul Huda, *Hukum pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2009), hlm. 28.

yakni organisasi kekuasaan yang atas dasar hak kedaulatan bertanggung jawab atas seluruh pemerintahan.¹⁸

Pemerintahan yang bersih (*clean government*) adalah bagian yang integral dari pemerintahan yang baik (*good government*) dan pemerintahan yang bersih tidak bisa dipisahkan dari pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik (*good government*) mencerminkan kesinergian antara pemerintah, swasta dan masyarakat, *Good government* sebagai norma pemerintahan adalah suatu sasaran yang akan dituju dan diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik dan asas-asas umum pemerintahan yang layak sebagai norma mengikat yang menuntun pemerintah yang *good government*.¹⁹

Hakikat fungsi pemerintahan (Pejabat Administrasi) adalah sebagai pelayan masyarakat. Muaranya adalah kesejahteraan masyarakat yang dilandasi dengan kepastian hukum dan kesesuaian substansi hukum dengan budaya hukum masyarakat. Pelaksanaan kewibawaan pemerintah akan melahirkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, hal ini berlaku jika pemerintah bertindak berdasarkan hukum sebagai pangkal lahirnya pemerintahan yang bersih.²⁰

Di dalam Negara modern “*welfare state*” ini tugas pemerintah bukan lagi sebagai penjaga malam dan tidak boleh pasif tetapi harus aktif turut serta

¹⁸ Victor m. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika 1994), hlm. 26.

¹⁹ Muin Fahmal, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Bersih*, (Yogyakarta: Uii Press, 2006), hlm. 61.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 70.

dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua orang tetap terjamin. Dengan demikian pemerintah harus memberikan perlindungan bagi warganya bukan hanya dalam bidang politik tetapi juga dalam bidang sosial ekonomi sehingga kesewenang-wenangan dari golongan kaya harus dicegah oleh pemerintah. Oleh sebab itu tugas pemerintah diperluas dengan maksud untuk menjamin kepentingan umum sehingga lapangan tugasnya mencakup berbagai aspek yang semula menjadi urusan masyarakat seperti masalah kesehatan rakyat, pendidikan, perumahan, distribusi tanah dan sebagainya. Jadi di dalam *Welfare State* Pemerintah itu disertai *bestuurzorg* yaitu penyelenggaraan kesejahteraan umum.²¹

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan Nasional tidak dapat dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, setiap daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah tersebut diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab di daerah. Sebagai tindak lanjut penyelenggaraan otonomi daerah adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini merupakan kebijakan yang lahir dalam rangka menjawab dan memenuhi tuntutan reformasi dan semangat pembaharuan akan demokratisasi hubungan pusat dan daerah serta upaya pemberdayaan daerah.

²¹ St Marbun dan Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 45.

Sehingga dapat dipahami bahwa inti dari otonomi daerah adalah demokratisasi dan pemberdayaan.

Bahwa sesuai dengan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 dan sesuai dengan otonomi yang diberikan kepada daerah, maka daerah diberi hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dan kepadanya diberikan sumber-sumber pendapatan yang cukup. Tetapi mengingat tidak ada semua sumber pendapatan itu dapat diberikan kepada daerah maka kepada daerah diberi wewenang untuk menggali segala sumber-sumber keuangan yang tersedia sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wewenang yang diberikan kepada Daerah tersebut antara lain:

1. Pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1974.
2. Penyelenggaraan pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah Pasal 62 Undang-undang No. 5 Tahun 1974.
3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perhitungan atas APBD Pasal 64 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1974.²²

Teori otonomi daerah berasal dari istilah "*Autos*" berarti sendiri, dan "*Nomos*" berarti pemerintahan. Jadi otonomi berarti "pemerintahan sendiri" dan secara dogmatis pemerintahan disini dipakai dalam arti luas. Menurut

²² *Ibid.*, hlm. 123-124.

perkembangan pemerintah Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundangan (*regeling*) juga mengandung arti pemerintahan (*bestuur*).²³

Perwujudan dari daerah otonom adalah pemerintah daerah dapat menggali sendiri potensi kekayaan alam di daerah yang kemudian mengolahnya menjadi sumber pendapatan di daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, daerah selain diberi wewenang untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, juga diberikan kesempatan dalam pembentukan daerah. Pembagian urusan pemerintah di Indonesia, pada hakekatnya dibagi dalam tiga kategori, yakni urusan pemerintah yang dikelola oleh pemerintah pusat (pemerintah), urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi, dan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, daerah sendiri mempunyai hak sebagai berikut:²⁴

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. Memilih pimpinan daerah

²³ Tjahya Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 20.

²⁴ Siswanto sunaryo, *Hukum Pemerintah Daerah diindonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 57.

- c. Mengelola aparatur daerah;
- d. Mengelola kekayaan daerah;
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g. sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah maka daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatannya masing-masing guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2008 perubahan kedua atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 157 adalah hasil retribusi daerah.²⁵ Pasal ini menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- 1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Hasil pajak daerah;
 - b. Hasil retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

²⁵ Pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

- d. Lain-lain PAD yang sah.
- 2. Dana perimbangan; dan
- 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari bidang Pariwisata merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, karena mendorong perkembangan beberapa sektor perekonomian nasional, misalnya: peningkatan kegiatan perekonomian sebagai akibat dibangunnya prasarana dan sarana demi pengembangan pariwisata, meningkatkan industri-industri baru yang erat kaitannya dengan pariwisata seperti halnya hotel dan restoran, meningkatkan perolehan devisa negara serta memberikan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, peningkatan penerimaan pajak bagi pemerintah, dan peningkatan pendapatan nasional.²⁶

Menurut Lunberg (1997) pariwisata adalah konsep umum yang sejarahnya kembali kemasa lampau (tahun 1811), atau sebelumnya, dan definisinya terus berubah. Robert Mc Intosh bersama Shashikat Gupta mencoba merumuskan suatu konsepsi mengenai pariwisata yang dapat dipergunakan sebagai pegangan untuk membangun industri, dan mereka mengungkapkan bahwa pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis pemerintah tuan rumah, serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan serta pengunjung lainnya.²⁷

²⁶ Oka A. Yoeti, *Ekonomi Pariwisata*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 27-28.

²⁷ Kusmayadi dan Endar Sugiarto, *Metodologi Penelitian dalam Bidang Kepariwisata*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 4-5.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reaserch*). Data primer diperoleh langsung dari lapangan. Dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, berupa wawancara, observasi, dokumen-dokumen, buku-buku, artikel-artikel, dan bahan hukum lainnya.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan sistematis keadaan obyek yang diteliti kemudian menganalisa data yang terkumpul.

3. Jenis data

Secara umum, dalam penelitian dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari secara langsung dari sumbernya. Data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya tetapi diperoleh dari bahan pustaka berupa dokumen.²⁸

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

²⁸ *Ibid.*, hlm. 51.

a. Data Primer

Penulis dalam rangka mengadakan penelitian ini mengambil lokasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta. Data dan fakta yang didapat langsung dari Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Berupa dokumen-dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian ini serta sumber internet, majalah, tabloid, dan sumber-sumber referensi lain.

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis melakukan dengan cara: Wawancara, Observasi dan Dokumentasi, serta pengumpulan data-data dan bahan-bahan dokumen, berupa arsip yang ada di Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.

5. Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian ini didasarkan kepada metode penelitian kualitatif berdasarkan kerangka teori yang dipakai.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam bentuk skripsi ini penulis susun dalam lima bab, sehingga merupakan rangkaian pemikiran yang saling mengikat. Adapun isi Bab pertama sampai Bab kelima adalah sebagai berikut :

Bab *Pertama*: Pendahuluan dalam pendahuluan ini penulis kemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori dan metode penelitian.

Bab *Kedua*: menjelaskan tinjauan umum tentang keuangan negara, sumber-sumber pendapatan negara, keuangan daerah, dan sumber-sumber pendapatan daerah, pengelolaan keuangan yang baik serta kepariwisataan dalam otonomi daerah.

Bab *Ketiga*: pembahasan tentang gambaran umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Dan Implementasi Perda No. 4 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta.

Bab *Keempat*: berisi analisa antara data yang ada dengan menggunakan kerangka teori yang hasil penelitian menguraikan bagaimana Implementasi Perda No. 4 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta serta hambatan-hambatan yang ditemui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta.

Bab *Kelima*: Dalam bab ini memuat penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari keseluruhan skripsi.

BAB V PENUTUP

A. Pelaksanaan Kepariwisataan

Isi dari hasil penelitian ini mempunyai beberapa kesimpulan tentang pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Otonomi Daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Dampak positif otonomi daerah adalah memunculkan kesempatan identitas lokal yang ada di masyarakat, berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan tanggapan positif dari pemerintah daerah dalam menghadapi permasalahan yang berada di daerah terutama masalah keuangan, dengan adanya Undang-undang No 32 Tahun 2004 ini sekaligus menjadi peluang pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan di daerah, dengan Undang-undang ini juga memungkinkan pemerintah lokal dapat mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan pariwisata. Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah juga akan lebih tepat sasaran dan tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga akan lebih efisien.
2. Dalam implementasi penyelenggaraan kepariwisataan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2010 sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan kepariwisataan

dan kebudayaan yang mengutamakan kepentingan masyarakat serta melakukan pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata. Tingginya tingkat kunjungan wisatawan ke tempat wisata diharapkan akan mempengaruhi tingginya kunjungan wisatawan ke hotel dan restoran, semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan Pendapatan asli Daerah (PAD). Hubungan baik yang terjalin antara Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Yogyakarta dan Instansi Pemerintah lain, serta peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjaga kebersihan, keamanan dan pelestarian dikawasan obyek wisata, juga merupakan upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisata.

B. Hambatan dalam Pelaksanaan Kepariwisataaan

1. Hambatan dalam pelaksanaan kepariwisataan di Kota Yogyakarta didasarkan kepada daya dukung Infrastruktur, Keamanan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Keramahan yang belum maksimal dalam upaya penyelenggaraan usaha kepariwisataan. Dari segi perencanaan masih mengandalkan kepada instansi pemerintahan baik pemerintah daerah maupun pihak swasta yang tentunya berdampak kepada manfaat ekonomi pariwisata ini masih dinikmati pemerintah daerah dan swasta, sedangkan kondisi masyarakat sekitar masih perlu ditingkatkan kesejahteraannya, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat sekitar belum mampu mengikuti kebutuhan wisatawan.
2. Kawasan obyek wisata di Kota Yogyakarta merupakan obyek wisata yang cukup potensial untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata, perkembangan kepariwisataan dikawasan obyek wisata ini ternyata banyak

membawa dampak yang positif ekonomi terhadap pemerintah daerah dan masyarakat, diantaranya adalah meningkatkan jumlah wisatawan, memberi peluang kesempatan kerja pada masyarakat dalam upaya mensejahterkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta selain melakukan pemeliharaan dan pengamanan terhadap kawasan obyek wisata maupun fasilitas, juga melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat, pengelola hotel dan restoran serta mengupayakan tumbuhnya peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kepariwisataan dalam pengembangan kepariwisataan untuk pengembangan obyek wisata Kota Yogyakarta.

C. Saran-saran

1. Adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah kunjungan wisatawan Terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka perlu mendapatkan perhatian lebih serius oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk dapat meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pendukung serta perawatan obyek wisata yang lebih baik sebagai langkah untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Diperlukan adanya suatu kebijakan tentang pelatihan, seperti halnya melalui pendidikan, pembinaan dan pelatihan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan kebutuhan usaha perhotelan dan restoran.
2. Kegiatan promosi wisata dari segala macam cara, seperti media online, pagelaran promosi budaya, dan atraksi wisata lain untuk lebih sering dilakukan secara berkelanjutan. Penyediaan anggaran sebesar 5% oleh

Pemerintah Daerah dari pendapatan sebelumnya dinilai belum cukup dalam rangka memenuhi kegiatan promosi yang lebih luas guna menyerap dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara. Maka diperlukan tunjangan kegiatan promosi pariwisata yang lebih besar dari sebelumnya guna menarik minat wisatawan berkunjung kembali.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abimanyu, Anggito dan Megantara, Andi. *Era Baru Kebijakan Fiskal*, Kompas, Jakarta, 2009.
- Anggraini, Yunita dan Puranta, Hendar. *Anggaran Berbasis Kinerja*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2010.
- Atmaja, Arifin P. Soeria. *Keuangan Publik Dalam Prespektif Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Darise, Nurlan. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, PT Indeks, Jakarta, 2009.
- Fahmal Muin. *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahn yang Bersih*, UII Press, Yogyakarta, 2006.
- Halim, Abdul dan Mujib, Ibnu . *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah*, Sekolah Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta, 2009.
- Halim, Abdul. *Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2004.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Ilyas, Wirawan B. *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, 1999.
- Ilyas, Wirawan B. dan Burton, Richard. *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2010.
- Kaho, Josef riwo. *Prespektif Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Kaloh, J. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Kodhyat, *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 1996.

- Kusmayadi, dan Endang Sugiarto. *Metodologi Penelitian Dalam Bidang Kepariwisata*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Mangkuwerdoyo, Sudiarto. *Pengantar Industri Akomodasi dan Restoran*, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 1999.
- Mangkuwerdoyo, Sudirto. *Perkembangan Pengelolaan Industri Akomodasi dan Restoran*, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 1999.
- Marbun St dan Mahfud Moh. MD. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Pawito. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, LKIS, Yogyakarta 2007.
- Pitana, I Gde dan Diarta, I Ketut Surya. *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Andi Offset, Yogyakarta, 2009.
- Priantara, Diaz. *Kupas Tuntas Pengawasan Pemeriksaa, dan Penyidikan pajak*, PT Indeks, Jakarta, 2011.
- Pringgodigdo, A.K. *Tiga Undang-Undang Dasar*, PT Pembangunan, Jakarta, 1974.
- Situmorang, M Victor dan Sitanggang Cormentyana. *Hukum Administrasi Pemerintah di Daerah*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-3 Jakarta , Penerbit UI, 2010.
- Spillane, James J. *Ekonomi Pariwisata dan Sejarah Serta Prospeknya*, Kanisius, Yogyakarta, 1987.
- Sutowo, Pontjo. *Pariwisata Sebagai Domain Ekonomi*, Masyarakat Pariwisata Indonesia MPI, Jakarta, 2006.
- Suparmoko, M. *Keuangan Negara*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2000.
- Sunarno, siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Supriatna, Tjahya. *Sistem Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Sunarto, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Amus dan Citra Pustaka, Yogyakarta, 2005.
- Suwantoro, gamal. *Dasar-Dasar Pariwisata*, Andi Offset, Yogyakarta, 2004.
- Tunggal, Amin Widjaja. *Pelaksanaan Pajak Penghasilan Perseorangan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.

Tjisoresmi, Endang. *Peran Industri Kepariwisata Dalam Perekonomian Nasional Dan Daerah*, P2E-Lipi, Jakarta, 2003.

Wahab, salah. *Manajemen kepariwisataan*, Cetakan Ketiga, PT Pradnaya Paramita, Jakarta, 1996.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang dasar 1945

Undang-undang No. 17 Tahun 2003

Undang-undang No. 32 dan 33 Tahun 2004

Undang-Undang No. 12 Tahun 2008

Undang-undang No. 28 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005

Perda No. 4 Tahun 2010

C. Lain-lain

<http://www.satubumi.org/kota-tujuan/10-besar-kota-tujuan-wisata-domestik-indonesia-65>. Diakses tanggal 10 Juli 2013 Pukul 19.55

<http://pariwisata.jogjakota.go.id/index/extra.detail/2189/menbudpar--pariwisata-hasilkan-us--7-miliar.html>, diakses pada tanggal 28 September 2013 pukul 23.00

<http://www.suaramerdessa.com/v2/index.php/read/cetak/2011/03/04/138922/Yogya-Maksimalkan-Pariwisata->, diakses tgl 25 September 2013 pukul 23.30

Lampiran-lampiran





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 1102 / 2013
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 24 September 2013

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami:

No	Nama	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Arif Fahmi	09340113	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapat pengetahuan dan informasi dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 4 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM PRESPEKTIF OTONOMI DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA"**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan kerjasama kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Kamsi, MA.

NIP. 19570207 198703 1 003 ?

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN IJIN

070 /Reg / V/ 7077 / 9 /2013

Membaca Surat : WAKIL DEKAN BID. AKADEMIK FAK.
SYARIAH & HUKUM UIN SUKA YK

Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/1102/2013

Tanggal : 18 SEPTEMBER 2013

Perihal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/opengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : ARIF FAHMI

NIP/NIM : 09340113

Alamat : JI. MARSDA ADISUCIPTO YOGYAKARTA

Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 4 TAHUN 12010 TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM
PRESPEKTIF OTONOMI DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA

Lokasi : KOTA YOGYAKARTA

Waktu : 26 SEPTEMBER 2013 s/d 26 DESEMBER 2013

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk *compact disk* (CD) maupun mengunggah (*upload*) melalui website : adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan naskah cetakan asli yang sudah di syahkan dan di bubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentatati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui *website*: adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 26 SEPTEMBER 2013

An. Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pengembangan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Hendri Susilowati, SH.

NIP.1950120 198503 2 003

Tembusan:

- 1 Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan)
- 2 Walikota Yogyakarta CQ Ka. Dinas Perizinan
- 3 Ka. Dinas Pariwisata DIY
- 4 WAKIL DEKAN BID. AKADEMIK FAK. SYARIAH & HUKUM UIN SUKA YK
- 5 YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241, 515865, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZINNOMOR : 070/2696
6265/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/reg/V/7077/9/2013 Tanggal : 26/09/2013
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : ARIF FAHMI NO MHS / NIM : 09340113
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum - UIN SUKA YK
Alamat : Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Iswanto, S.H, M.H
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan Judul Proposal : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 4 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 26/09/2013 Sampai 26/12/2013
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

ARIF FAHMI

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 27-9-2013An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

ENY RETNOWATI, SH

NIP. 196103031988032004

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY
3. Ka. Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kota Yogyakarta
4. Ybs.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini saya,

Nama

.....*Syahrul Setyadi*.....

Posisi

.....*Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kota Yk (bid. P3)*.....

Alamat

.....*Kg. Girinatan No. 1/1306 Yk.*.....

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

**“IMPLEMENTASI PEDANA NO. 4 TAHUN 2010 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM
PRESPEKTIF OTONOMI DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA”**

Oleh saudara:

Nama

: Arif Fahmi

Nim

: 09340113

Jurusan

: Ilmu Hukum

Fakultas

: Syari'ah dan Hukum

Semester

: IX

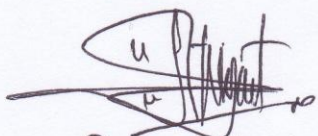
Universitas

: UIN Sunan Kalijaga

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 September 2013

Pihak yang diwawancarai


(.....*Syahrul Setyadi*.....)

CURICULUM VITAE

Nama : Arif Fahmi
TTL : Indramayu, 01 Agustus 1992
Agama : Islam
Negara : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Nama Orang Tua : Ayah : Sudiono
Ibu : Roaenah
Alamat : Sukaperna RT 04 RW 02 Tukdana Indramayu Jawa Barat 45272
Pendidikan : MI PUI Sukaperna Tukdana Indramayu 1997 - 2003
MTS Cadangpinggan Kertasmaya Indramayu 2003 - 2006
MAN Model Babakan Ciwaringin Cirebon 2006 - 2009
UIN Sunan Kalijaga 2009 - Sekarang